

BAB II

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN ISLAM

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terkebelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya.

Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.

2.1 Kapita Selektta Pembangunan Ekonomi Konvensional

Sekitar tahun 1950-an definisi pembangunan ekonomi lebih menekankan pada pendapatan per kapita. Misalnya yang dikemukakan oleh Meier dan Baldwin dalam bukunya "*Economics Development, Theory, History and Policy*". "*Economics development is a process*

whereby an economics real national income increase on a long period of time. And if the rate of development is greather than rate of population growth, than per capita real income will increase” (Baldwin 1957: 2-3).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur; 1. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang didalamnya telah menagndung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; 2. Usaha meningkatkan pendapatan per kapita; 3. Kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai alternative umum, indeks ekonomi pembangunan telah dipakai tingkat pertumbuhan GNP per kapita sebagai bahan pertimbangan suatu negara untuk mengukur tingkat *out put* yang lebih besar²². Di sisi lain, ukuran pembangunan ekonomi dengan pendapatan perkapita memiliki banyak kelemahan di antaranya;

²² DR. Suryana, M.Si ,”*Ekonomi Pembangunan, problematika dan pendekatan*” (Jakarta : salemba empat) hlm 2

1. Tingkat kesejahteraan seseorang sulit diukur dan subjektif sifatnya;
2. Dalam perhitungannya kurang memperhatikan aspek distribusi pendapatan;
3. Pendapatan per kapita tidak dapat memberikan gambaran mengenai masalah pengangguran. Dengan hal tersebut pembangunan merupakan suatu jalinan eksistensi yang tidak terpisahkan dari masalah social dan ekonomi²³. Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang di laksanakan perl mempertimbangkan factor-faktor yang bersifat non-ekonomi, yaitu untuk melengkapi analisis yang ditinjau dari sisi ekonomi.

Michael P Todaro dalam bukunya “*Economics for Development World : an Introduction Principles Problem and Policies for Development*” mengemukakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses multi-dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga – lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan. Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang mencakup dimensi yang lebih luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (*Development is not*

²³ *Ibid*, hlm 4

*static concept, it is coutinously). United Nation: development administration: current approach and trade in public administration for national development 1975).*²⁴

Dalam memahami ekonomi pembangunan, perlu juga membedakan pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam pembangunan ekonomi terkandung adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat atau GDP dimana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebaga kenaikan GDP tanpa memandang kanaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan perubahan dalam struktur ekonominya atau sebaliknya.²⁵

Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya. Contoh: dalam berita media masa sering mencantumkan kalimat; “pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen”. Maksudnya adalah: Pada tahu 2007 pendapatan nasional riil negara Indonesia itu telah ngalami kenaikan sebanyak 5% dibandngkan tahun 2006. Dengan demikian untuk

²⁴ Pengantar Pemikiran tentang Teori dan strategi Pembangunan Nasional, Prof. H. Bintaro Tjokroaminoto dan Drs. Mustapadidjaja : PT Gunung Agung, Jakarta, 1982

²⁵ DR. Suryana, M.Si ,”*Ekonomi Pembangunan, problematika dan pendekatan*” (Jakarta : salemba empat) hlm 5

menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi akan selalu digunakan formula berikut:

$$g = \frac{G - G_0}{G_0} \times 100$$

Unsur-unsur formula tersebut adalah:

- a) g adalah tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi.
- b) G_1 (gross domestic product atau produk domestic bruto) adalah pendapatan nasional riil yang dihitung pada harga tetap yang dicapai dalam satu tahun (tahun 1).
- c) G_0 adalah pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Dengan menghitung menurut harga tetap, pendapatan nasional riil yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa yang sebenarnya berlaku dalam ekonomi. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dalam satu tahun tertentu. Dan menggambarkan sampai dimana barang dan jasa telah bertambah pada tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam analisis pembangunan ekonomi, fungsi lain pendapatan perkapita adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran di berbagai negara. Dalam konteks ini disumsikan tingkat kemakmuran suatu negara di refleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi daya beli

pernduduk, dan daya beli masyarakat ini meningkatkan kesejahtraan msasyarakat.

Adapun tujuan membandingkan tingkat kesejahtraan berbagai negara, nilai pendapatan per kapita di setiap negara perlu dinyatakan dalam dollar Amerika (US\$). Dan hal yang akan ditunjukkan dalam membuat perbandingan itu adalah: (i) perbandingan dan perbedaan tingkat pebangunan yang terjadi dalam satu tahun atau satu periode tertentu; dan (ii) perubahan yang berlaku dalam perbedaan pembangunan diantara berbagai negara dalam jangka waktu panjang.

Tabel. 1. Pendapatan per kapita berbagai golongan negara tahun 2001

Golongan Negara	Pendapat an per kapita (US\$)	Jumlah penduduk (juta)	Persentase penduduk (%)
Negara berpendapaatan rendah	430	2.510,6	40,9
Golongan bawah negara berpendapatan menengah	1.240	2.164,5	35,3
Golongan atas negara berpendapatan menengah	4.460	503,7	8,2
Negara berpendapatan tinggi	26.710	955,0	15,6

Sumber: World Development Report 2003, The World Bank and Oxford University press.

Simpulan utama yang dapat diambil dari data tabel tersebut adalah:

1. Terdapat *gap development* atau jurang pembangunan diantara negara berpendapatan rendah dan negara berpendapatan tinggi. Dan dari data tersebut menggambarkan negara kaya rata-rata pendapatan perkapitanya adalah 62 kali dari yang dicapai oleh negara berpendapatan rendah.
2. Negara berpendapatan rendah meliputi 40,9 dari penduduk dunia, sedangkan negara berpendapatan tinggi hanya meliputi 15,6 persen dari penduduk dunia.
3. Yang digolongkan sebagai negara berkembang terutama dari negara berpendapatan rendah dan golongan bawah negara berpendapatan menengah yaitu meliputi kedua golongan pertama. Di samping itu, sebagian dari golongan atas dari negara berpendapatan menengah masih di golongkan dalam negara berkembang.
4. Dua golongan pertama dari negara-negara (golongan 1 dan 2) penduduknya telah meliputi 76,2 persen dari penduduk dunia. Dalam perhitungan kasar, kedua golongan ini pendapatan per kapitanya rata-rata hanya mencapai sekitar US\$800. Pendapatan tersebut lebih kurang hanya meliputi **tiga persen** dari pendapatan per kapita rata-rata negara berpendapatan tinggi.

Dari poin-poin terhadap data yang terdapat dalam tabel 1.1 dapat dibuat suatu gambaran umum mengenai taraf kemakmuran yang

dicapai di berbagai negara, dan jauhnya *gap development* diantara berbagai negara. Hal ini merupakan sumbangan yang sangat penting dari data pendapatan per kapita dalam menganalisis pembangunan ekonomi.

a. Teori-teori Pembangunan Ekonomi Konvensional

Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of the Nation*” menegemukakan factor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan menimbulkan tingkat spesialisasi. Dengan tingkat spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi.²⁶

i. Teori Pembangunan Ekonomi Neo-Klasik

dalam buku “*the Theory of Economics Development*” karya Yosep Schumpeter mengemukakan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurut Yosep pembangunan ekonomi bukan merupakan sebuah proses yang harmonis dan gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus.²⁷

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Kata kunci yang dikemukakan Schumipeter ini adalah *entrepreneur*.

²⁶ DR. Suryana, M.Si ,”Ekonomi Pembangunan, problematika dan pendekatan” (Jakarta : salemba empat) hlm 54

²⁷ *Ibid.* hlm 57

Dengan kata kunci tersebut Schumpeter yakin bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif. Dalam masalah lain Schumpeter membedakan penanaman modal dalam perekonomian menjadi dua golongan, yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh.²⁸ Penanaman modal otonom dalam jangka panjang ditentukan oleh penemuan alam baru dan teknologi berkemajuan. Sedangkan penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal sebagai akibat adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan atau keuntungan perusahaan.²⁹

Sumbangan terpenting dari teori pembangunan ekonomi neoklasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, tapi kepada kemungkinan menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dan menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Robert Solow menunjukkan antara 80-90% pertambahan pendapatan per kapita dalam perekonomian Amerika Serikat dalam pertengahan abad 19 dan 20 bukanlah bersumber dari kenaikan stok modal.³⁰ Kemajuan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perbaikan kemampuan tenaga kerja. Kenyataan tersebut merupakan bantahan dari pandangan-pandangan

²⁸ *Ibid.* hlm 59

²⁹ *Ibid.* hlm 60

³⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2006. Hlm. 268

teori-teori klasik yang menganggap bahwa pembangunan ekonomi bersumber dari pembentukan modal.

ii. Teori Pembangunan Ekonomi Modern

Pembangunan ekonomi modern dalam transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang akan mempunyai banyak dimensinya. Menurut Rostow pembangunan ekonomi bukan saja menyangkut perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi juga menyangkut proses yang menyebabkan;

(1) perubahan reorientasi organisasi ekonomi, (2) perubahan masyarakat, (3) perubahan cara penanaman modal, dari penanaman modal yang tidak produktif kepada yang lebih produktif, (4) perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dari *family system* menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan, (5) perubahan pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam, selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Dari poin-poin tersebut Rostow mengartikan secara umum bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam politik, struktur social, nilai social dan struktur ekonominya. Dalam buku "*The Stages of Economics*" Rostow membagi kepada lima

tahapan dalam proses pembangunan di setiap negara pada umumnya, yaitu:

- a. ***The Traditional Society (Masyarakat Traditional)*** adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang did lam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan, dan sikap yang masih primitif dan pemikiran yang irasional. Jika perubahan dan cirri-ciri penting masyarakat di atas menyebabkan pembangunan atau pertumbuhan selalu berlaku (ekonomi) maka bisa dianggap sebagai tarap prasyarat untuk lepas landas (*pre-condition for take-off*)
- b. ***Precondition for take-off (persyaratan tinggal landas)*** adalah suatu masa transisi dimana suatu masyarakat sudah mempersiapkan dirinya untuk mencapai pembangunan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*)
- c. ***Take Off (Tinggal Landas)*** adalah suatu masa dimana berlakunya perubahan yang sangat drastic dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbbentuknya pasar baru (industry ekonomi)
- d. ***The Drive to Maturity*** adalah suatu masa diamana masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar factor produksi dan kekayaan alam.

- e. *The Age of High Mass Consumption* adalah suatu masyarakat dimana perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

Dalam pendapat tokoh ekonomi yang lainnya, professor Kuznet menganalisis secara lengkap enam ciri pembangunan ekonomi modern yang dimanifestasikan dalam proses pertumbuhan oleh semua negara yang sekarang telah maju. Enam karakteristik itu terbagi dalam dua variabel kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produksi nasional dan pertumbuhan penduduk, dua berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi berhubungan dengan penyebaran internasional.

A. Dua variabel ekonomi yang bersamaan meliputi:

1. Tingginya tingkat produk per kapita dan laju pertumbuhan penduduk.
2. Tingginya peningkatan produktivitas terutama produktivitas tenaga kerja

B. Dua variabel struktural transformasi :

1. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
2. Tingginya tingkat struktur sosial dan ideologi

Dua variabel penyebaran internasional :

1. Kecenderungan negara-negara yang ekonominya sudah maju untuk pergi ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pasaran dan bahan baku.
2. Arus barang, modal, dan orang antar-bangsa yang mengikat.

Menurut Kuznet karakteristik pertumbuhan ekonomi modern tersebut adalah sangat berinterelasi dan saling memperkuat. Tingginya tingkat produktivitas per kapita adalah hasil dari meningkatnya tingkat tenaga kerja yang cepat. Tingginya pendapatan per kapita menyebabkan tingginya tingkat konsumsi per kapita.³¹

Dengan demikian memberikan intensif untuk mengubah struktur produksi karena jika penghasilan meningkat, maka permintaan akan barang-barang industry dan jasa-jasa lebih banyak dari permintaan akan produk-produk yang bersifat premier.

2.2.4 Model Pembangunan Ekonomi Konvensional

Modernisasi ekonomi merupakan sebuah masalah untuk model pembangunan untuk terciptanya orientasi-orientasi yang terstruktur rapih. Adapun model ini bisa bermacam-macam arti. Williard Belling mengemukakan dalam bukunya “Modernisasi Masalah Model Pembangunan” arti fundamental dari model adalah bisa diartikan dengan tahap, startegi dan teori.³²

Orientasi model pembangunan ekonomi yang sangat penting adalah pada pertumbuhan. Karena tujuan pokok strategi ini adalah

³¹ DR. Suryana, M.Si, ”Ekonomi Pembangunan, problematika dan pendekatan” (Jakarta : salemba empat) hlm 65

³² *Ibid.* hlm 67

untuk meningkatkan laju produksi. Kenaikan GNP merupakan focus utama dan sebagai parameter ekonomi dan social yang paling naik untuk mempengaruhi tingkat hidup suatu masyarakat.³³ Dan variabel utama dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan yang seimbang. Diperlukan modal investasi yang besar di segala bidang untuk mencapai tahap dimana dapat dicapai suatu kenaikan laju pertumbuhan secara menyeluruh. Karena dengan pembangunan seimbang ini bisa menjaga agar dalam pembangunan tersebut tidak mengalami hambatan-hambatan yang bersifat premier.

Variabel sebaliknya adalah pertumbuhan yang tidak seimbang. Untuk membantu orientasi laju pertumbuhan yang cepat harus mengoptimalkan para *forward-backward linkages effect* atau kaitan dengan industri-industri pada tahapan produksi untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan. Model pembangunan tidak seimbang ini dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di negara-negara berkembang. Karena negara-negara tersebut terkadang menghadapi masalah keuangan dan sumber daya.³⁴

Menurut Hirschman, pokok analisis pembangunan tidak seimbang ini adalah bagaimana caranya menentukan proyek-proyek yang harus didahulukan perkembangannya supaya penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia menciptakan tingkat

³³ *Ibid.* hlm 68

³⁴ *Ibid.* hlm 70

perkembangan ekonomi yang maksimal.³⁵ Model pembangunan ekonomi selanjutnya adalah yang berorientasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Dengan model tersebut sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan produksi. Pendistribusian kembali pendapatan dan harta produktif melalui perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Sasaran utamanya adalah sector informal di perkotaan dan sector tradisional di pedesaan melalui fasilitas seperti pendidikan, jasa kredit, dan lain-lain.

Model pembangunan yang hampir sama adalah berorientasi terhadap penghapusan kemiskinan. Tentu strategi model ini adalah untuk menghapus keimiskinan dan berusaha meningkatkan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP kelompok miskin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijakan fiscal dan kredit, reorientasi produk melalui proyek padat karya dan realokasi sumber daya produktif yang menguntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dan konsumsi.

2.3 Kapita Selektif Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan

³⁵ *Ibid.* hlm 71

jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut, "*economic development is growth plus change*" (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi).³⁶ Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang menyatukan penggunaan kedua istilah tersebut. Penyatuan istilah ini

³⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 415

walaupun tidak bisa dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara.

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, kedua istilah ini juga ditemukan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.³⁷

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*.³⁸

(Pertumbuhan terus-menerus dari factor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life*.³⁹ (Proses untuk mengurangi

³⁷ Bisa dilihat dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim klasik, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, At-Tusi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim. Penjelasan tentang pemikiran ekonomi para ulama tersebut lihat, Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought*, Malaysia, Loqman Malaysia, 1992.

³⁸ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, Malaysia, International Islamic University Press, 1987, hlm.55

³⁹ Munawar Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam buku Abul Hasan Muhammad Sadeq, hlm. 102

kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan).

Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

2.3.1 Prinsip Pembangunan Ekonomi Menurut Islam (Pandangan Para Ulama)

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil. Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Alquran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara muslim.

Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara

berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan model barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan.

Dr. Abdullah Abdul Husein At-Tariqy mengungkapkan, "Banyak ahli ekonomi Islam dan para fuqaha yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus."⁴⁰

⁴⁰ Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami*, Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf, Dar An-Nafais, Kuwait, 1999, hlm. 276.

Dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi ini, yaitu : 1. *Tauhid rububiyah*, yaitu menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. 2. Keadilan, yaitu pembangunan yang tidak pincang (senjang), tetapi pembangunan ekonomi yang merata (*growth with equity*) 3. *Khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumberdaya yang diamanahkan kepadanya. dan 4. *Tazkiyah*. yaitu mensucikan manusia dalam hubugannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan negara.⁴¹

Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas dapat diperjelas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah :

1. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan

⁴¹ Masudul Alam Choudhuri, *Contributions to Islamic Economic Theory*, New York: St.Martin', Press, 1986, hlm. 7-20

adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.

3. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
4. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada,
 - a). Pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin.
 - b). Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

1.3.2 Konsepsi Syariah

Konsepsi ekonomi Islam berbeda dengan konsepsi ekonomi Kapitalis atau yang biasa disebut dengan ekonomi konvensional. Perbedaan itu tidak hanya mengacu pada aspek akidah atau asas, tetapi juga meliputi standar nilai, dan metode untuk mengaplikasikannya. Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama kita. Sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan

ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara.⁴²

Dalam hal bagaimana memecahkan problem ekonomi dan membangun konsepsi ekonomi menurut Islam, Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang monumental *an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam* mengemukakan pada dasarnya metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah sama dengan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hidup manusia lainnya.⁴³

Artinya dalam seluruh bidang kehidupan manusia beserta problem-problem yang dihadapinya metode pemecahannya adalah sama, yakni dengan menerapkan hukum syariah. Yang berbeda hanya bidang atau obyek yang dihukumi bukan syariahnya.

Inti permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan adalah permasalahan perolehan kegunaan permasalahan ini berasal dari pandangan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidup. Karena itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur dan mengarahkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai individu yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh

21. Muhammad Muhammad Ismail, *Refreshing Pemikiran Islam*, (al-Fikru al-Islamiy), alih bahasa A. Haidar, cet. i, (Bangil: Al-Izzah, 2004), hal. 65-69.

22 Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (an-Nizham al-Iqtishadi fii al-Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. vii, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 45-46.

sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia bukan dipandang secara kolektif.⁴⁴

Untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut an-Nabhani menggariskan perlunya hukum-hukum yang mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (disebut juga tiga kaidah perekonomian), serta suatu politik ekonomi dalam rangka pemecahan permasalahan ekonomi.⁴⁵

Adapun **politik ekonomi Islam** merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup dengan interaksi-interaksi tertentu, serta memungkinkan orang tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan gaya hidup tertentu yakni yang berlandaskan syariat Islam.

2.3.3 Paradigma Riayah

Paradigma *riayah* adalah paradigma yang menjadikan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat sebagai *mindset* kebijakan (*riayatu as-su'un al-ummah*).⁴⁶ Maksudnya setiap pemegang kebijakan pemerintahan dia harus menjadikan kebijakannya dalam rangka pemeliharaan urusan rakyat. Dalam konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut dilakukan menurut syariah.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “*Seorang imam (khalifah)*

⁴⁵ *Ibid*, hal. 50 dan 52.

⁴⁶ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam, (Afkaru Siyasiyyah)*, alih bahasa Abu Faiz, cet. i, (Bangil: al-Izzah, 2001), hal. 11

adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya a politik. Sehingga membahas ekonomi Islam tidak boleh dilepaskan dari pembahasan tentang politik atau pemerintahan. Dengan kata lain tidak boleh kita membahas ekonomi dalam sudut pandang Islam tetapi di sisi lain konsepsi sistem politik yang diadopsi justru konsepsi Kapitalisme dan sekularisme. Jika ini yang dilakukan maka ekonomi Islam atau apa yang disebut ekonomi syariah tidak pernah jadi dan tidak pula dapat memecahkan problem ekonomi.

Dengan paradigma *riayah* pemerintah memikul tanggung jawab besar yakni memecahkan problem dan berposisi sebagai perisai yang melindungi rakyat. Bagaimana tanggung jawab pemerintahan dalam Islam atas rakyatnya digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berikut ini:

Andaikan ada seekor hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena tidak memperbaiki jalan tersebut.⁴⁷

Dalam konteks kepemimpinan dan pembangunan yang telah dijalankan selama ini, kita merasakan lambatnya pemerintah melakukan pelayanan terhadap rakyatnya. Misal bila ada jalan umum yang rusak maka harus menunggu waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Kebijakan ekonomi juga terkesan tidak adil sebab pertumbuhan ekonomi dijadikan acuan dalam pembangunan yang

⁴⁷ *ibid*, hal. 127.

mengakibatkan kebijakan lebih berpihak kepada para investor daripada rakyat. Akibatnya pembangunan justru melahirkan kemiskinan dan ketimpangan.

2.3.4 Sistem Kepemilikan

Kepemilikan atas kekayaan hakikatnya adalah milik Allah. Allah melalui hukum-hukum-Nya telah menyerahkannya kepada manusia untuk diatur dan dibagikan.⁴⁸ Kepemilikan dalam Islam meliputi tiga jenis, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hukum syara' atas ketiga jenis kepemilikan ini berbeda.

Kepemilikan *individu* merupakan hukum *syara'* yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu sehingga siapa saja dapat memanfaatkan dan memilikinya.⁴⁹ Pengakuan Islam atas kepemilikan individu merupakan pengakuan atas fitrah manusia itu sendiri yakni naluri mempertahankan diri. Namun Islam mengatur kepemilikan individu sehingga seseorang tidak menzalimi orang lain ataupun merusak kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dengan aturan ini, maka individu tidak boleh menguasai aset-aset ekonomi yang termasuk ke dalam kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

Kepemilikan *umum* adalah izin Allah kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, yakni benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah untuk suatu komunitas dimana mereka

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, hal. 66

masing-masing saling membutuhkan, dan Allah melarang benda tersebut dikuasai oleh individu (swasta). Benda-benda kepemilikan umum ada tiga macam, yaitu :⁵⁰

- a) Fasilitas umum yang jika tidak terdapat dalam suatu komunitas dapat menyebabkan sengketa untuk mencarinya.
- b) Bahan tambang yang jumlahnya tak terbatas.
- c) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu (swasta).

Kepemilikan *negara* adalah harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khilafah, dimana khalifah dapat mengkhuskan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Adapun harta-harta yang menjadi milik negara antara lain harta *fai'*, *jizyah*, *kharaj*, *dharibah*⁵¹.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 237.

⁵¹ *Ibid*, hal. 243.